



► MASALAH PKL

# Pengusaha Malioboro Datangi Wali Kota

**UMBULHARJO**—Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) A. Yani terus berjuang agar area sekitar toko mereka bersih dari pedagang kaki lima.

Abdul Hamid Razak  
[hamied@harianjogja.com](mailto:hamied@harianjogja.com)

► PPM A. Yani mendesak Wali Kota Jogja segera menata PKL Malioboro.

► Ada tiga hal yang dikritisi PPM A. Yani saat mendatangi Wali Kota Jogja.

Setelah gugatan mereka diolok Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogja, kali ini belasan orang dari PPM A. Yani menemui Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti, Senin (3/9). Mereka menuntut Pemkot segera menata keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro.

Setidaknya ada tiga hal yang dikritisi PPM A. Yani soal aktivitas PKL di kawasan Malioboro. Para PKL dinilai memakai lahan yang ada semau mereka sendiri dan hanya memberikan akses masuk selebar setengah meter ke toko.

Padahal lahan yang digunakan PKL tersebut merupakan milik disertifikasi atas nama pemilik toko. "Kami tidak dapat apa-apa karena PKL semena-mena akses jalan masuk ditutupi. Kami meminta agar

### Aturan Main PKL Di Malioboro

1. PKL Kawasan Khusus Malioboro sampai Jl. A. Yani dilarang untuk menambah jumlah personelnya.
2. PKL bisa ditempatkan pada trotoar di persimpangan jalan depan Kantor Eks Kanwil Pekerjaan Umum Propinsi DIY, depan Gedung DPRD Propinsi DIY, depan kompleks Kepatihan, depan Gedung Perpustakaan Nasional Propinsi DIY dan depan Gereja GPIB Jogja dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan.
3. PKL wajib memiliki Surat Izin Penggunaan Lokasi PKL dan Kartu Identitas PKL.
4. PKL yang boleh menggunakan tenda dan peralatannya adalah yang berada di luar pertokoan

Sumber: Pemkot Jogja

akses masuk sepertiga dari lahan toko," kata Ketua PPM A. Yani Sadana Mulyono sebelum bertemu Wali Kota.

Tidak hanya itu, PPM A. Yani yang beranggotakan 220 pemilik toko juga gerah dengan aktivitas jual beli lapak PKL. Menurut Mulyono sejak sekian lama lapak PKL dijual belikan dan disewakan oleh PKL.

Harga sewanya juga fantastis, mulai Rp25 juta-Rp100 juta per tahun. "Seharusnya satu PKL punya satu lapak. Nyatanya di lapangan satu orang bisa memiliki lima lapak, ada yang naik Toyota Fortuner. Itu bukan PKL lagi, tapi jualan PKL," kata Mulyono.

Di hadapan Wali Kota, PPM A. Yani juga mengkritisi rencana penataan kawasan Malioboro yang mengharuskan pemilik toko memasang kanopi untuk PKL. Hal itu ia nilai bakal jadi masalah jika hujan turun. "PKL akan menutupi dagangannya dari atas kanopi sehingga toko akan semakin tertutup. Keberadaan gerobak PKL saja saat ini dinilai mengganggu estetika karena sering ditinggal di depan toko," kata dia.

Mulyono menyangkan selama ini pihaknya belum pernah diajak berunding dan komunikasi terkait rencana penataan kawasan Malioboro. Eksistensi para pemilik toko di kawasan Malioboro seperti diabaikan oleh pemerintah. "Saat ini PKL over kapasitas. Para pejalan kaki sudah tidak nyaman karena terbenut barang-barang PKL," kata dia.

Jika Pemkot susah menghilangkan keberadaan PKL, Mulyono berharap setidaknya Pemkot bisa membatasi keberadaan PKL. "Misalnya satu toko hanya dibatasi untuk dua PKL. Faktanya di lapangan, satu PKL saat ini dipenuhi antara empat sampai enam PKL sehingga dinilai over kapasitas."

Wali Kota Haryadi Suyuti mengaku masih membicarakan masalah pertemuan itu di internal Pemkot. "Yang jelas ini hanya pertemuan silaturahmi. Tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain [sengketa di PTUN]," ujar Haryadi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 05 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005